PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Telepon (0265) 771511,
Laman setda.ciamis.kab.go.id, Pos 46211

Ciamis, 23 Februari 2024

Nomor : 900.1.3/ 46 -Perkeu/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Yth. Bapak Bupati Ciamis

di

C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat kami nomor 000.8.6.3/1885-Org tanggal 21 Desember 2023 hal Penyusunan LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, bersama ini terlampir disampaikan dokumen LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilaporkan capain kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran terhadap 6 (enam) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **102,63%.** Hal ini bermakna bahwa seluruh program/kegiatan telah mencapai bahkan melampaui ekspektasi kinerja;
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar **Rp 96.199.144.403,00** atau **91,82%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp104.768.862.525,00.**

Demikian laporan yang disampaikan, kiranya Bapak menjadi maklum.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19640218.198703.1.007

Tembusan:
Yth. 1. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
2. Bapak Sekretaris Daerah;
3. Bapak Inspektur.

Lampiran I
Nomor : 900.1.3/ 46 -Perkeu/2024
Tanggal : 23 Februari 2024
Hal : Data Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023

DATA CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,00	3,1262	104,21	Melebihi Target
		2 Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	102,89	102,89	Melebihi Target
2	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian danAdministrasi Pembangunan	3 Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi .Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	105,53	105,53	Melebihi Target
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	88,29	88,37	100,09	Melebihi Target

4		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	5 Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	82,42	84,43	102,44	Melebihi Target
	5	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	6 Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3	3	100,00	Sesuai Target
	6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	7 Nilai Pelaporan Keuangan Setda	800	833,43	104,17	Melebihi Target
	JUMLAH RATA-RATA					**102,63**	

PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS

LKIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

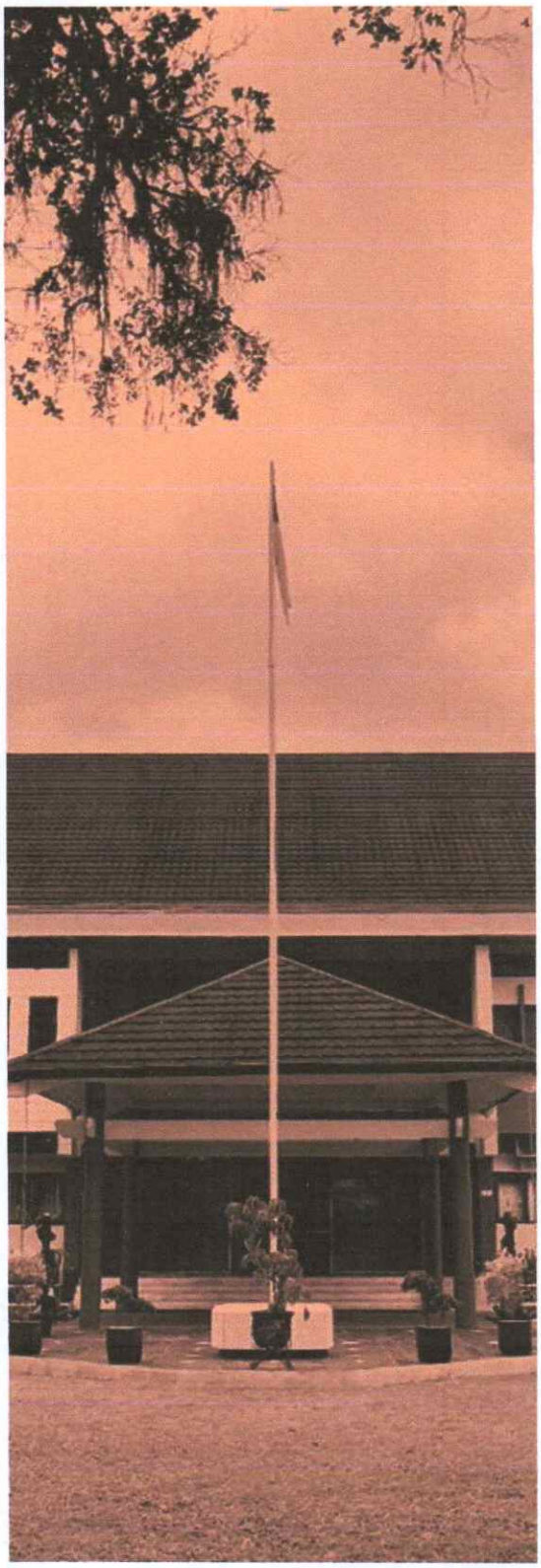

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023, merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Ciamis yaitu 'Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua'. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pencapaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

LKIP Tahun 2023 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Hasil Pencapaian ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak.

Semoga dokumen LKIP Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Ciamis di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Ciamis, Februari 2024
Sekretaris Daerah
Kabupaten Ciamis

Dr. H. TATANG, M.Pd.
NIP. 19640316 198412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2023. Sekretariat Daerah pada tahun 2023 memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target tersebut diperoleh hasil capaian realisasi kinerja rata-rata sebesar **102,63%** dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3	3,1262	104,21	Melebihi Target
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	102,89	102,89	Melebihi Target
2.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100	105,53	105,53	Melebihi Target
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	88,29	88,37	100,09	Melebihi Target
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data , pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	82,42	84,43	102,44	Melebihi Target
5.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3	3	100	Sesuai Target

	terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah					
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	800	833,431	104,17	Melebihi Target

**Indikator Kinerja yang diampu yingkat*

Kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar **Rp96.199.144.403,00** atau **91,82%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp104.768.862.525,00** .

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
IKHTISAR EKSEKUTIF **2**
DAFTAR ISI **5**

BAB I.
PENDAHULUAN **6**
LATAR BELAKANG 7
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 9
SUMBER DAYA MANUSIA **12**
ISU STRATEGIS 13
SISTEMATIKA PENYUSUNAN 14

BAB II.
PERENCANAAN KINERJA **15**
CASCADING SEKRETARIAT DAERAH 17
PERJANJIAN KINERJA 18
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 20

BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA **22**
DATA CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023 23
SASARAN STRATEGIS I 25
SASARAN STRATEGIS II 33
SASARAN STRATEGIS III 44
SASARAN STRATEGIS IV 49
SASARAN STRATEGIS V 52
SASARAN STRATEGIS VI 56
AKUNTABILITAS KEUANGAN 59

BAB IV.
PENUTUP **60**

LAMPIRAN **62**

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

LKIP SETDA 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Ciamis serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya Ayat (3) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit Eselon IIb yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervisi perangkat daerah di sesuaikan dengan ruang lingkup asisten, serta 10 (sepuluh) unit Eselon IIIa yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomro 24 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama;

2. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan,bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
5. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi pelaporan;
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;

7. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
9. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
10. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

SUMBER DAYA MANUSIA

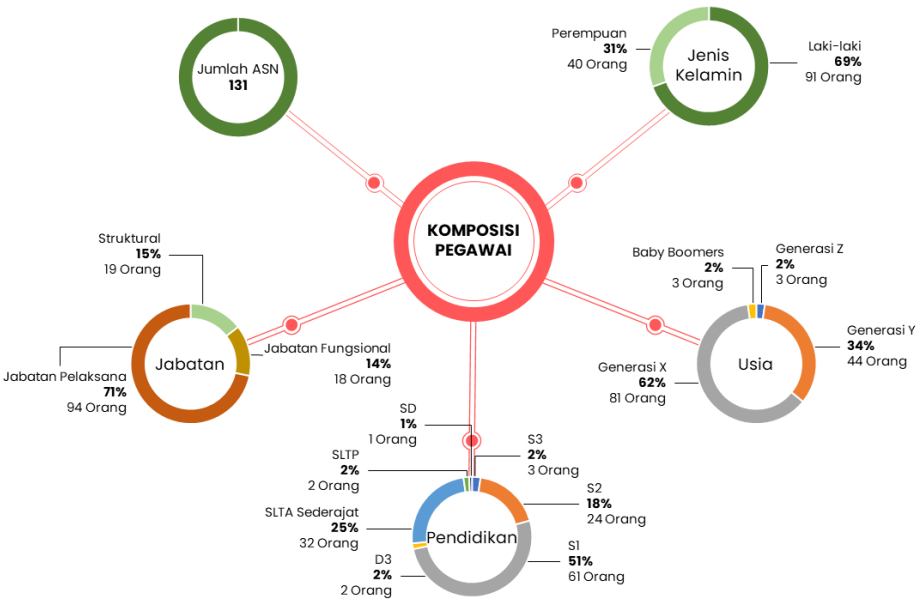

Berdasarkan data kepegawaian s.d bulan Desember 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memiliki pegawai sebanyak 131 orang. Dari sisi kualitas, potensi ASN pada Sekretariat Daerah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai didominasi jenjang pendidikan tinggi S1 (51%) dan S2 (18%). Namun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak 2 pegawai (2%), jumlah ini lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 32 orang (25%). Hal ini perlu diperhatikan karena terdapat kekosongan pada jabatan kelas 6 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 42-57 tahun atau Generasi X sebanyak 81 orang (62%), untuk Generasi Y (Milenial) dengan rentang usia 26-41 tahun sebanyak 44 orang (34%). Sedangkan Generasi Z dengan usia dibawah 26 tahun sebanyak 3 orang (2%). Sekretariat Daerah juga masih memiliki ASN dengan rentang usia diatas 58 tahun atau Generasi Baby Boomers sebanyak 3 orang (2%). Keempat komposisi tersebut menggambarkan mayoritas ASN pada Sekretariat Daerah memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama serta memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi dan juga diharapkan dapat mendukung pemeberian pelayanan publik secara lebih adaptif, mengingat mayoritas penerima layanan saar ini merupakan generasi milenial yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

ISU STRATEGIS

MEMPERHATIKAN SITUASI LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL, DAERAH SERTA INTERNAL TERDAPAT PERMASALAHAN POKOK YAKNI DALAM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAAN PEMERINTAH YANG BELUM OPTIMAL SEHINGGA APABILA DIBEDAH LEBIH DALAM TERDAPAT TIGA PERMASALAHAN YANG DIUNGKIT.

KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM

Dengan adanya perubahan komposisi pegawai akibat adanya rotasi dan mutasi yang terjadi didalam internal Sekretariat Daerah sehingga terdapat adanya kekurangan pejabat yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut, dan menyebabkan pelayanan yang kurang optimal.

Perlu adanya regenerasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam melaksanakan pelayanan yang optimal. Dengan adanya perkembangan IT yang berkembang sehingga diperlukan adanya bimbingan teknis atau pelatihan dalam pengelolaan dibidangnya

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH

Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan perumusan kebijakan. Dalam praktiknya terdapat pemahaman yang berbeda dalam implementasi kebijakan, sehingga diperlukan adanya pelaskanaan kerjasama antara perangkat.

PELAPORAN KEUANGAN

Dalam penyusunann pelaporan keuangan, Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih baik.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, termasuk mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, SDM lingkup sekretariat daerah, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Mengulas perjanjian kinerja Sekretariat Daerah serta program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target 2022, target perencanaan jangka menengah Renstra Setda, Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Setda pada tahun 2023 termasuk catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Setda dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Secara umum, peran sekretariat daerah sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah pada penyediaan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Secara spesifik, peran sekretariat daerah terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian misi ke-lima pembangunan daerah yaitu 'Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas'.

CASCADING SEKRETARIAT DAERAH

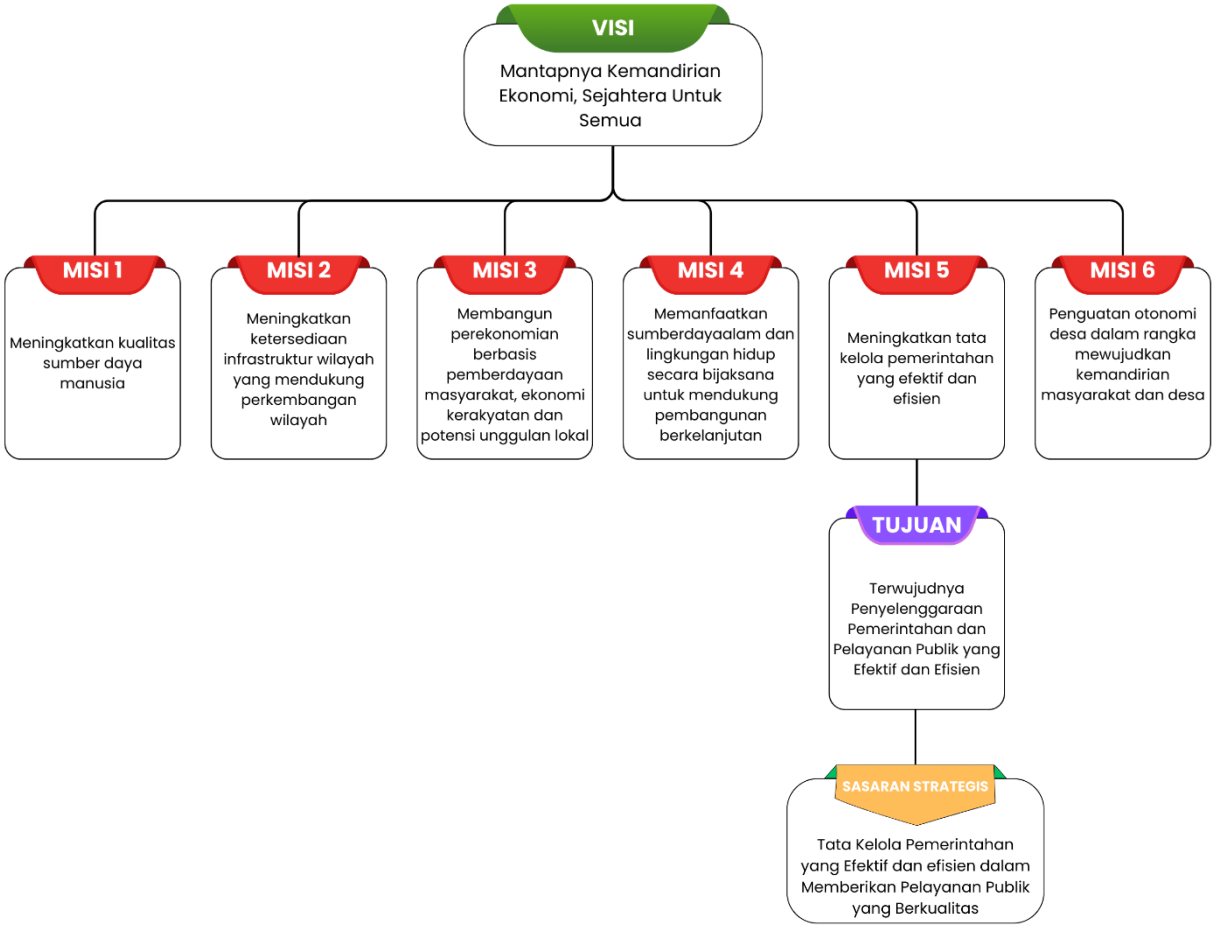

Pada level sasaran strategis, sekretariat daerah satu sasaran strategis pembangunan Kabupaten Ciamis, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas yang mendukung terwujudnya Misi Kelima Yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk mendukung ketercapaian target sasaran strategis pembangunan tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan tujuan yang dijabarkan kedalam satu sasaran strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya merupakan kinerja dari kesepuluh bagian.

PERJANJIAN KINERJA

DENGAN TELAH DITETAPKANNYA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENCERMINKAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS UNTUK TAHUN 2023, MAKA SASARAN DAN INDIKATOR TERSEBUT DITUANGKAN KE DALAM PERJANJIAN KINERJA. ADAPUN PERJANJIAN KINERJA DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3
	• Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	• Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	88,29
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data , pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	• Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	82,42
Meningkatnya penyelenggaraan	• Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3

secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	• Nilai Pelaporan Keuangan Setda	800

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakanlah sejumlah 3 program, 20 kegiatan, dan 75 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya penambahan pada belanja pada struktur anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sehingga menjadi total **Rp. 104.768.862.525.**

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp62.008.906.670,-	• Bagian Pemerintahan dan Kerjasama • Bagian Kesejahteraan Rakyat • Bagian Hukum
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp1.599.468.500,-	• Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam • Bagian Administrasi Pembangunan

			• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp41.160.487.355,-	• Bagian Perencanaan dan Keuangan • Bagian Umum • Bagian Organisasi • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DATA CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Status Kinerja	3	3,1262	104,21
		Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	102,89	102,89
2.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Persen	100	105,53	105,53
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Nilai	88,29	88,37	100,09
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	82,42	84,43	102,44
5.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Level	3	3	100,00

	pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah					
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Nilai	800	833,43	104,18

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat' merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Daerah dalam melaksanakan core competence-nya yaitu penyusunan kebijakan publik. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis berkualitas. Adapun fokus diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap tata kelola pemeritahan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini menjadi salah satu pendukung perwujudan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagaimana Misi 5 Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu (1) Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti; (2) Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti. Secara umum, ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **103,55%**. Hal ini menunjukan bahwa dari sisi perumusan kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut

Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuann dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skroring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

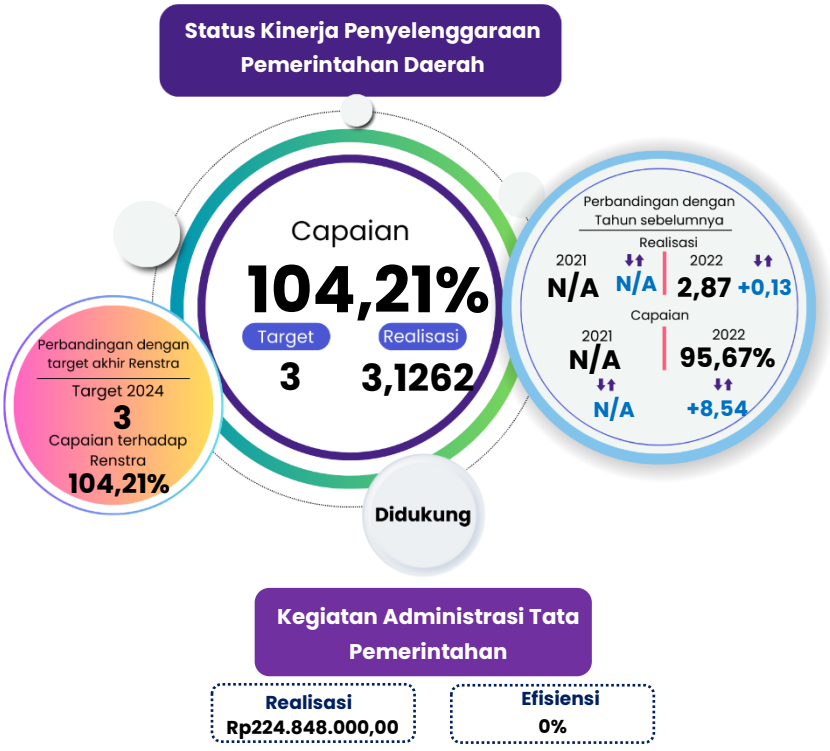

Pada Tahun 2023, pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kinerja Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri diperoleh skoring LPPD Kabupaten Ciamis yang ditargetkan sebesar **3 poin** dapat direalisasikan sebesar **3,1262 poin** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **104,21%**. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, kinerja meningkat sebesar **0,2562 poin** atau **8,93%** dari capaian kinerja sebesar **95,67%.** Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai **104,21%**. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana dengan tingkat kemajuan **4,21%**. Perolehan skoring LPPD Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 berdasarkan keputusan menteri dalam negeri No. 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2022 berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar **2,87** dengan status **kinerja sedang**.

Meningkatnya kualitas LPPD Kabupaten Ciamis didukung oleh meningkatnya penerapan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang memperlihatkan kinerja perangkat daerah yang sangat baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan. Selain itu, didukung pula oleh pemenuhan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), Laporan LPPD Kabupaten Ciamis serta dokumen evaluasi masing-masing perangkat daerah.

Pencapaian terhadap indikator ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggran yang mana kondisi tersebut didorong oleh dampak pandemi covid. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai kondisi di atas adalah dilakukannya efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. Selanjutnya secara teknis

dilaksanakan juga asistensi dan evaluasi bahan penyusunan LPPD dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Ketercapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar **Rp224.848.000,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp224.848.000,00**. Dengan demikian kinerja penggunaan anggaran tercapai sebesar **100%**.

Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

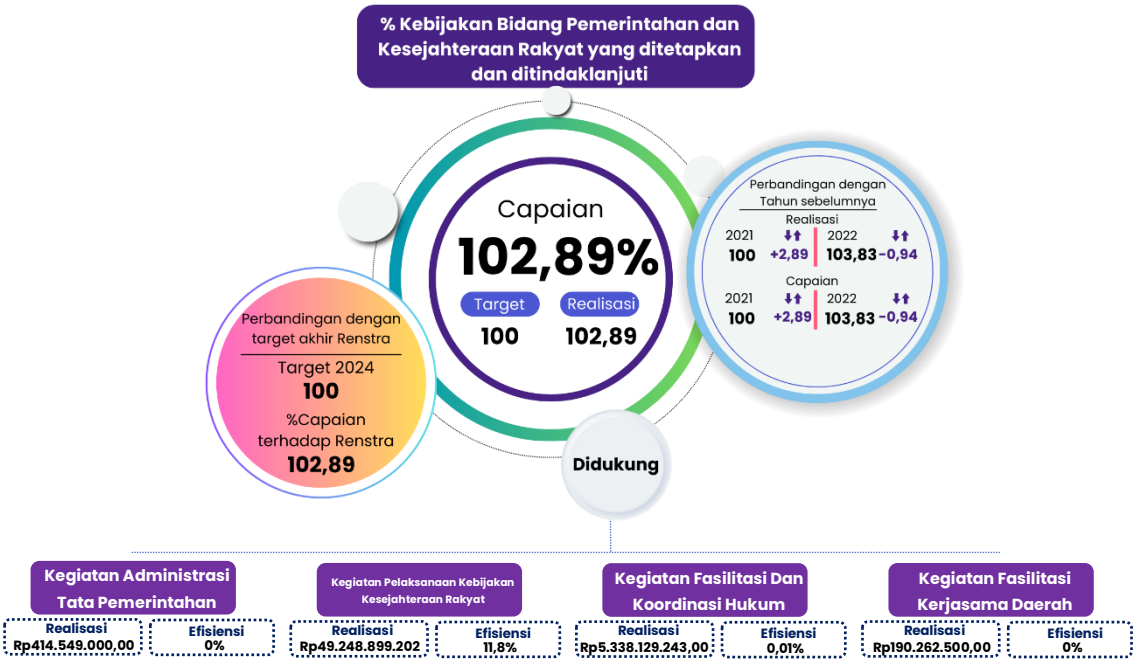

Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan yang telah disusun dan ditetapkan menjadi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk Tahun 2023, kinerja pada indikator ditargetkan tercapai sebesar **100%** dan dapat direalisasikan sebesar **102,89%** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **102,89%**. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, kinerja menurun sebesar **0,94 poin atau 0,91%** dari capaian kinerja sebesar **103,83%** . Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai **102,89%**. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana dengan tingkat kemajuan **2,89%.**

Memperhatikan hal tersebut, penetapan target kinerja pada tahun 2023 tidak merujuk pada realisasi kinerja Tahun 2022 hal ini disebabkan capaian kinerja tahun sebelumnya dipengaruhi oleh capaian indikator program khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yaitu persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan capaian kinerja melebihi target karena adanya program deregulasi dari pemerintah pusat.

Selanjutnya penetapan target Tahun 2023 sesuai dengan AKP (Analisis Kebutuhan Peraturan) sehingga ditetapkan target sebesar **100%** namun demikian apabila ada usulan dari SKPD tidak dapat ditolak.

Peningkatan kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas agenda setting dan formulasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta meningkatnya kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pencapaian kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas kajian dan formulasi kebijakan, monitoring serta evaluasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya-upaya yakni fasilitasi perumusan kajian kebijakan, formulasi kebijakan, pembentukan tim implementasi kebijakan, sosialisasi, pemantauan implementasi kebijakan serta penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Kondisi yang mendukung tercapainya kinerja tersebut yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dimensi pengukuran kinerja. Adapun upaya untuk mencapai kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat perubahan Kebihajakan Pusat, Usulan Pemrakarsa, Analisis Kebutuhan Regulasi Daerah dan Tingkat Fasilitasi Sarana Prasarana serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat khususnya di dalam Fasilitasi dan koordinasi Hukum yatu dengan adanya Peningkatan Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan melalui optimalisasi Deregulasi Produk Hukum Daerah yang di dukung dengan Dokumentasi dan Publikasi Informasi Hukum yang cepat, tepat dan valid.

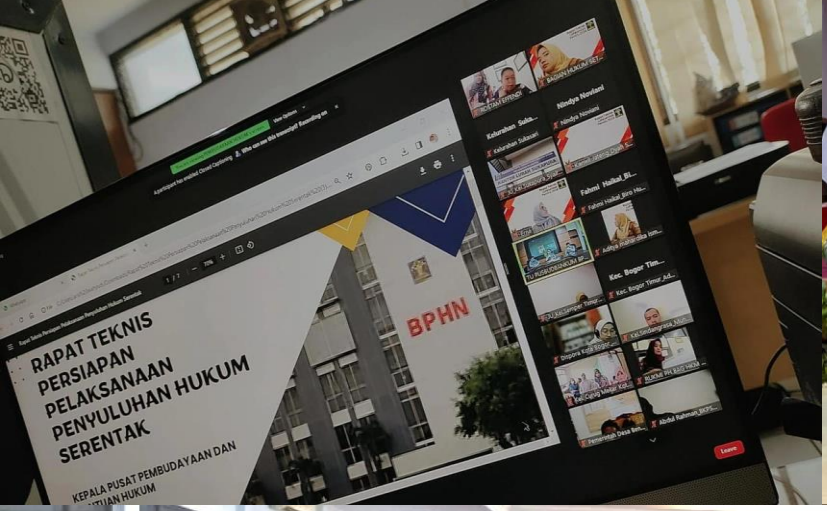

Ada berbagai faktor pendukung yang juga memepengaruhi peningkatan capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat yaitu mulai dari langkah asistensi produk hukum daerah, sosialisasi produk hukum, sosialisasi rancangan produk hukum, fasilitasi permasalahan hukum litigasi dan non litigasi, pembinaan desa sadar hukum, implementasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupate Ciamis, serta Penyuluhan Hukum.

Kondisi lainnya yang mendukung tercapainya target indikator sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yaitu telah dilakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat khususnya pada pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yaitu dengan peningkatan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi kegiatan. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya melalui bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat kabupaten dan provinsi, pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian target indikator ini dipengaruhi oleh kondisi pemerintahan dan kondisi anggaran yang kondusif serta perubahan kebijakan pemerintah. Selain itu pencapaian target indikator kinerja didorong oleh komitmen dari kepala daerah, ketersediaan regulasi,

kondisi sarana prasarana, kompetensi dari sumberdaya manusia dan yang terpenting adalah ketersediaan anggaran.

Dari total produk kebijakan yang dihasilkan, diperoleh 74 kebijakan yang terdiri dari 1 (satu) Peraturan Bupati, 69 (enam puluh sembilan) keputusan bupati, dan 4 (empat) surat edaran Bupati Ciamis. Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Pemerintahan dan kesejaheraan rakyat melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp 61.784.058.670,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp55.191.839.607,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **89,33%.** Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **10,67%** atau **Rp 6.592.219.063,00,00**.

Adapun daftar Kebijakan yang telah dihasilkan pada tahun 2023 disajikan dalam tabel pada lampiran.

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran kedua ini, berkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah dalam peningkatakan kualitas kebijakan di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan Kabupaten Ciamis berkualitas.

Kinerja sasaran meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan Tahun 2023 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan target dan realisasi kinerja yaitu target 100%, terealisasi sebesar 105,53%, menunjukkan capaian kinerja sebesar **105,53%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perumusan kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut:

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

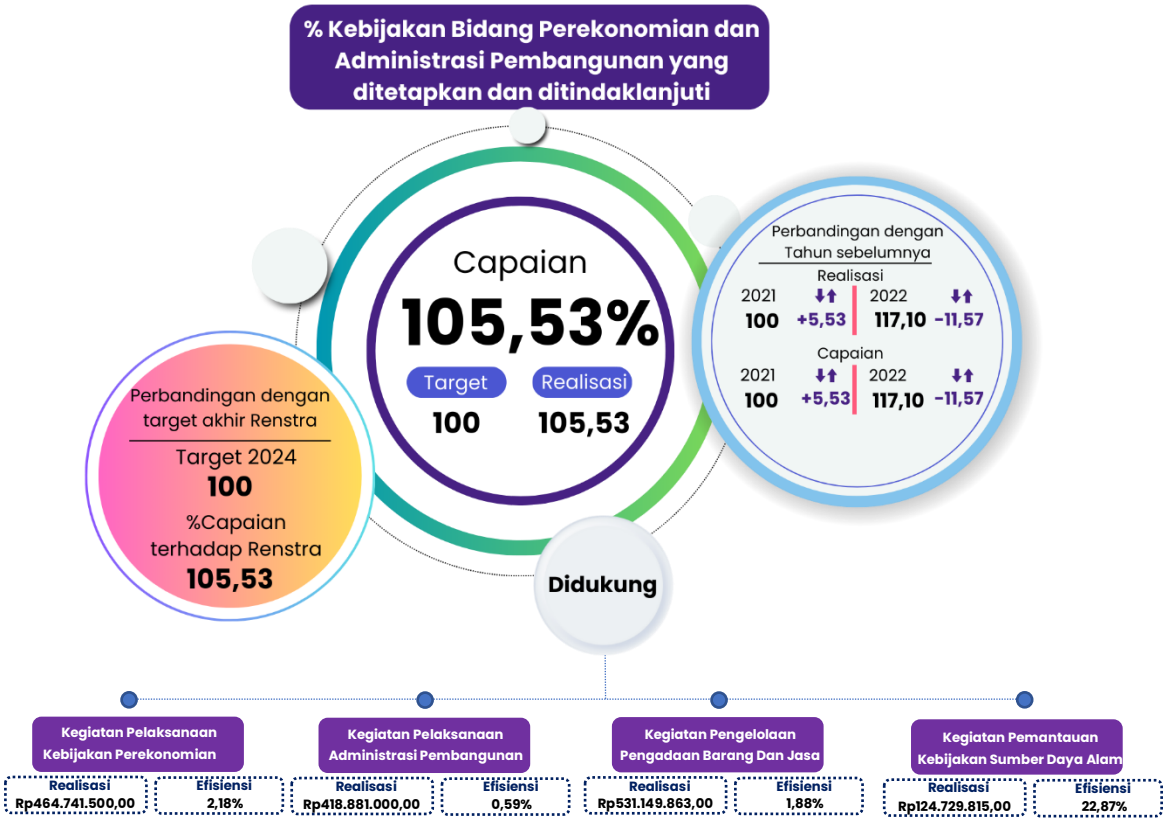

Kebijakan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan umum terkait perkonomian dan administrasi pembangunan yang disusun ditetapkan menjadi kebijakan daerah Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, kinerja terkait kebijakan bidang perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini di Tahun 2023 ditargetkan dicapai sebesar **100%** dan dapat terealisasi sebesar **105,53%.** Dengan demikian kinerja tercapai sebesar **105,53%**. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kinerja menurun sebesar **13,10%** dengan realisasi sebesar **121,44%**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai sebesar **105,53%** sehingga tingkat kemajuan untuk target renstra 2024 sebesar **5,53%**.

Memperhatikan hal tersebut, penetapan target kinerja pada tahun 2023 tidak merujuk pada realisasi kinerja Tahun 2022 hal ini disebabkan penetapan target setiap tahun dari segi pengadaan barang dan jasa, jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang direncanakan pada tahun berjalan berdasarkan dari rencana pengadaan yang ditargetkan sebanyak 700 paket pengadaan. Adapun capaian Tahun 2023 melebihi target dikarenakan pada kegiatan advokasi ada peraturan baru tentang pengadaan barang dan jasa yang perlu disosialisasikan serta melaksanakan kegiatan pembinan secara langsung ke OPD sehingga jumlah peserta yang dibina melebihi target yang ditetapkan.

Capaian sebesar **105,53%** tersebut peroleh dari capaian indikator program perekonomian dan pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan dan ditindaklanjuti target 100%, terealisasi sebesar **100%**, menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**.
2. Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada perangkat daerah target 100%, terealisasi sebesar **100%**, menunjukkan capaian kinerja sebesar **100%**.
3. Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa target 100%, terealisasi sebesar **116,60%**, menunjukkan capaian kinerja sebesar **116,60%**

Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan bidang perekonamian; meningkatnya rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi pembangunan pada perangkat daerah; serta meningkatnya fasilitasi pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan kualitas perencanaan kebijakan bidang perekonamian Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Daerah, bahwa Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;

2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Berkaitan hal tersebut dalam rangka Sinergitas program kegiatan pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun 2022 ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.48-Huk/2022 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022– 2024.

Selanjutnya dalam rangka perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil di Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan melalui upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di upload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin sesuai dengan kewilayahan masing-masing ke dalam SIKP; serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKP. Sebagai tindaklanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Dearah (TPAKD). Dalam rangka implementasi dan optimalisasi capaian kinerja percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Ciamis ditetapkan kebijakan bidang perekonomian yaitu: Keputusan Bupati Nomor :

500/kpts.574-Huk/2022 Tentang Perubahan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dengan program kerja Tim Perepatan Akses Keuangan di daerah diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan ke pelaku usaha mikro kecil. Untuk Tahun 2023 di 3 (tiga) Wilayah Kecamatan Sukadana, Kecamatan Cijeungjing dan Kecamatan Baregbeg.

Kondisi lainnya didorong oleh meningkatnya kualitas kajian dan formulasi kebijakan, monitoring serta evaluasi kebijakan BUMD, BLUD dan Investasi Daerah. Melalui upaya-upaya yakni fasilitasi perumusan kajian kebijakan, formulasi kebijakan, pembentukan tim implementasi kebijakan, sosialisasi, pemantauan implementasi kebijakan serta penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan Kinerja. Untuk mempercepat jalannya roda bisnis perusahaan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali serta meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 900.13.2/Kpts.499-Huk/Tahun 2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana Kabupaten Ciamis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023. Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan akses dan pengembangan sistem penyediaan air minum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.126-Huk/Tahun 2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Penetapan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya rumusan kebijakan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Adapun output/keluaran ketiga kegiatan diatas berupa dokumen/laporan pelaksanaan pembangunan daerah baik fisik/infrastruktur ataupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya selain infrastruktur, seperti kegiatan pengolahan data dan pelaporan pembangunan daerah yang mana output kegiatan ini berupa laporan realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan dalam menunjang perencanaan, pelaporan dan pelaksanaan pembangunan bidang fisik/infrastruktur dalam indikator sasaran ini menghasilkan output kegiatan berupa laporan fisik/infrastruktur pembangunan daerah yang dilaksanakan selama satu Tahun anggaran, laporan hasil monitoring dan evaluasi fisik/infrastruktur sebagai output dari kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.

Berdasarakan laporan-laporan pembangunan daerah tersebut (fisik dan non fisik) sebagai tindak lanjut pimpinan dalam perbaikan pembangunan daerah diperlukan adanya bahan rumusan kebijakan pimpinan untuk perbaikan pembangunan daerah baik fisik/infrastruktur maupun non fisik tersebut yang terdapat dalam output kegiatan rumusan hasil rekomendasi dan evaluasi program pembangunan daerah.

Tujuan Pelaksanaan desk pembuatan Kerangka Acuan Kerja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan:

1. Optimalisasi strategi pelaksanaan program, sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
2. Terlaksananya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam menjalankan strategi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Terintegrasinya strategi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyerapan Anggaran oleh masing-masing SKPD dapat terserap sesuai dengan target, jangan sampai Ketika target yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi sehingga terjadi deviasi, deviasi yang semakin besar mencerminkan perencanaan yang kurang bagus, dan menjadi diskusi untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada

Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Ciamis mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan kegiatan fasilitasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pembangunan Dan Evaluasi Program Pembangunan fisik di Kabupaten Ciamis.

Tugas Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. menyiapkan segala dokumen dan data yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program pemerintah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan/Analis Kebijakan Ahli Muda setiap OPD sebagai anggota Tim Evaluasi Realisasi Anggaran secara berkala melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada minggu pertama setiap bulan melalui Aplikasi Sistem Realisasi Anggaran (SIRAGA) sesuai tatacara yang ditentukan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan/Analis Kebijakan Ahli Muda setiap OPD sebagai anggota Tim Evaluasi dan Pengawasan Sistem Realisasi Anggaran (SIRAGA) berkewajiban melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui aplikasi (SIRAGA);
5. membantu pelaksanaan kegiatan secara teknis maupun proses administrasi guna kelancaran pada evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
6. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.

Kondisi lainnya yakni meningkatnya pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan upaya pembinaan tersebut. Sehingga meningkatnya kualitas layanan advokasi pengadaan barjas melalui penanganan permasalahan pengadaan barjas. Ditambah lagi dengan kondisi meningkatnya pemanfaatan sistem informasi pengadaan diantaranya melalui upaya penyediaan data pengadaan barjas; penyusunan rencana pengembangan sistem barjas; penyebaran informasi pengadaan barjas pada kanal informasi public; pelayanan permohonan pembuatan akun pengguna SPSE; penanganan pengaduan sistem pengadaan barjas. Terakhir yakni didorong oleh penciptaan kondisi meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui upaya evaluasi dan pemantauan pelaksanaan barang dan jasa; pendampingan perangkat daerah dalam mengelola kontrak pengadaan barang dan jasa; penyusunan katalog elektronik lokal; penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa; penyediaan rekomendasi paket pengadaan barang dan jasa; pengukuran kinerja pengadaan barjas melalui Sistem Penilaian Kinerja Penyedia (SIPEKA).

Upaya-upaya nyata diwujudkan diantaranya menambah jumlah SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa melalui rekrutmen PNS yang mempunyai potensi menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 4 orang. Selain itu, telah

dilaksanakan pendampingan pengisian RUP, pencatatan SPSE, dan tata cara belanja melalui *e-purchasing* kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Ciamis baik secara offline maupun online melalui Zoom Meeting. Upaya selanjutnya adalah membuat surat edaran Kepala Perangkat Daerah untuk pengisian RUP, pencatatan SPSE dan peningkatan transaksi melalui *e-purchasing* serta dengan menambah etalase katalog elektronik lokal.

Selain hal tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diantaranya :

1. Jumlah SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai rekomendasi LKPP terkait pemenuhan Jabatan Fungsional PBJ dimana di Kabupaten Ciamis baru terdapat 9 orang JF PPBJ dari 20 orang rekomendasi LKPP.
2. Jumlah SDM Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik baru 1 (satu) orang yang berstatus JF Pranata Komputer dari kebutuhan 5 (lima) orang JF Pranata Komputer untuk mengisi posisi Admin, Helpdesk dan Verifikator.
3. Sarana prasarana pendukung yang masih serba kekurangan diantaranya ketersediaan PC di Ruang Pelatihan dan untuk layanan kepada stakeholder.

Sebagaimana yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan kinerja, Pencapaian terhadap indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pelayanan barang dan jasa berbasis elektronik didukung dengan kondisi Meningkatnya kompetensi pelaku pengadaan Barang dan jasa, melalui upaya pembinaan disetiap perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan proses pengadaan barjas termasuk sistem pengadaan barang/jasa.

Tahun anggaran 2023 jumlah pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 783 paket dari target 700 paket, Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terealisasi 12 Dokumen dari target 12 Dokumen dan Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dibina terealisasi sebanyak 330 orang peserta dari target 260 orang peserta.

Ketercapaian kinerja Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti didorong oleh pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan melalui 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.599.468.500,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp1.539.502.178,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **96,25%.** Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **3,75%** atau **Rp 59.966.322,00.**

SASARAN STRATEGIS III

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Sekretariat Daerah dilakukan dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik serta untuk memastikan bahwa kinerja inti didukung dengan kondisi internal yang kondusif. Bahwa layanan yang diberikan Sekretariat Daerah akan berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja yang mendukung pembangunan Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda. Secara umum, ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **100,09%**. Hal ini menunjukan bahwa dari sisi kualitas, pelayanan publik tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut;

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan SKM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2023 dilaksanakan pada periode 1 Januari 2023 – 20 November 2023 dengan menggunakan metode e-survei melalui aplikasi Sistem Aplikasi Ciamis Peduli Terhadap Penilaian Pelayanan Publik (Siska Campernik) melalui alamat *siskacampernik.ciamiskab.go.id*, dengan total jumlah responden sebanyak 329 orang. Kuesioner memuat 10 (sepuluh) buah pertanyaan terkait dengan 10 (sepuluh) unsur pelayanan yang dinilai.

Untuk Tahun 2023, kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda ditargetkan tercapai nilai IKM sebesar **88,29 poin** sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya dan dapat direalisasikan sebesar nilai IKM sebesar **88,37 poin** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **100,09%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis adalah **Sangat Baik (A).** Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja meningkat sebesar **0,08** poin dari **88,29 poin** ke **88,37 poin**.

Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 menurun sebesar **7,04%** dari capaian kinerja sebesar **107,67%**. Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja meningkat sebesar **4,37 poin** dari target akhir renstra sebesar **84 poin** atau tercapai **105,2%**. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana dengan tingkat kemajuan **5,20%**.

Berdasarkan hasil SKM Tahun 2023 Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Pungutan Tidak Resmi (U8), unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9), serta unsur Biaya/Tarif (U4). Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah bebas dari pungutan liar, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik dan umumnya pelayanan diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Persyaratan (U1) dan Waktu Penyelesaian (U3). Berdasarkan hasil tersebut, terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan, kejelasan mengenai persyaratan layanan yang harus dipenuhi dan kesesuaian jenis pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan perlu mendapat perhatian untuk perbaikan. Namun demikian, secara spesifik untuk meningkatkan pelayanan pada Sekretariat Daerah, maka perlu melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SKM khususnya pada setiap unsur pelayanan yang memiliki nilai “Kurang Baik” dan “Tidak Baik”.

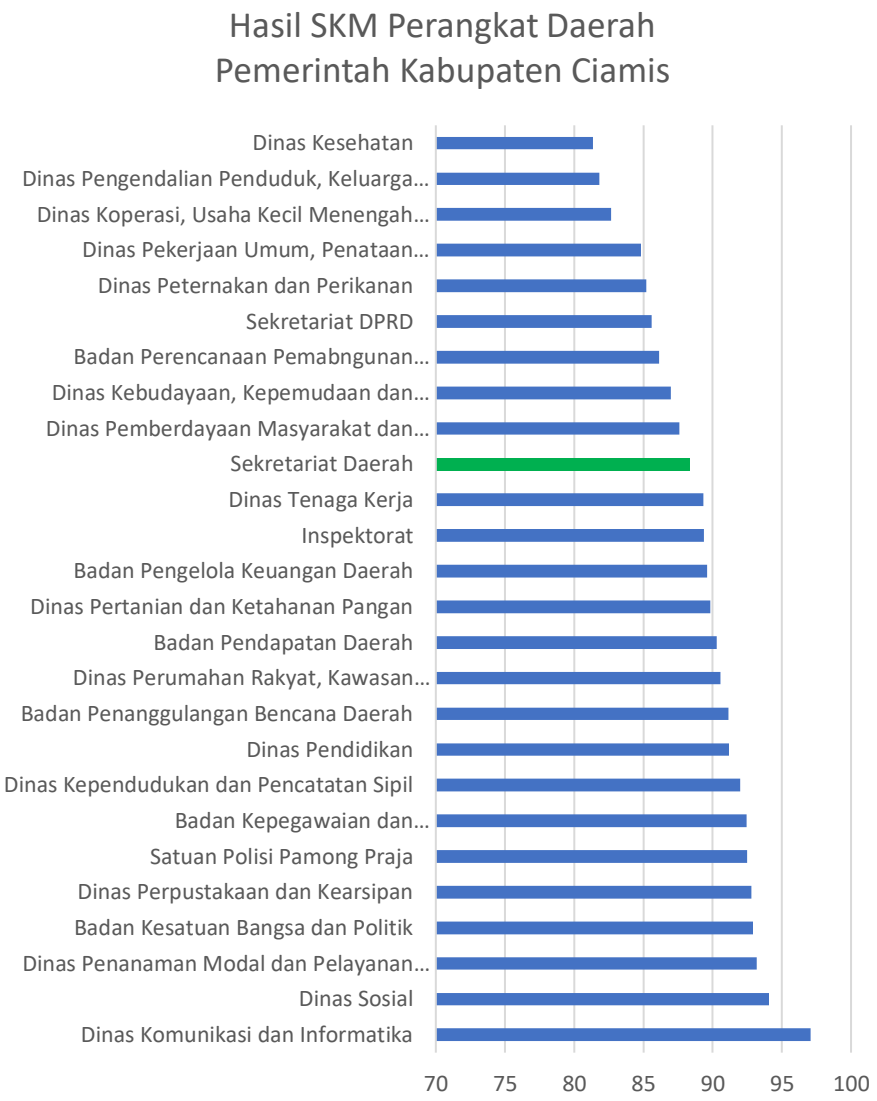

Faktor-faktor pendukung atas ketercapaian IKM Tahun 2023 yaitu:

1. Pelaksanaan SKM secara elekronik melalui siskacampernik.ciamiskab.go.id mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengisian survei oleh responden dan pengelolaan hasil SKM oleh setiap Unit Pelayanan Publik (UPP);
2. Terbentunya Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Adanya berbagai inovasi layanan;
4. Adanya komitmen aparatur pemerintah untuk menginternalisasi Budaya Kerja ASN "BerAKHLAK" dan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa";

5. Tingginya tingkat kepatuhan terhadap penerapan Standar Pelayanan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang IKM Setda adalah:

1. Optimalisasi penyampaian informasi layanan melalui media elektronik dan non-elektronik;
2. Melaksanaan evaluasi internal atas pelaksanaan pelayanan;
3. Melaksanaan Evaluasi SOP pada setiap Bagian;
4. Meningkatkan sistem layanan menuju digitalisasi layanan publik;
5. Optimalisasi pemanfaatan SKM secara elekronik melalui siskacampernik.ciamiskab.go.id pada setiap bagian.

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui kegiatan penataaan organisasi dan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.459.819.250,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp2.428.873.382,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **98,74%**. Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **1,26%** atau **Rp30.945.868,00**.

SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data , Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran keempat ini, berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimensi akuntabilitas kinerja. Adapun fokus ruang lingkup di dalamnya mencakup Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah. Ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **102,44%.** Hal ini menunjukan bahwa dari sisi akuntabilitas kinerja tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah

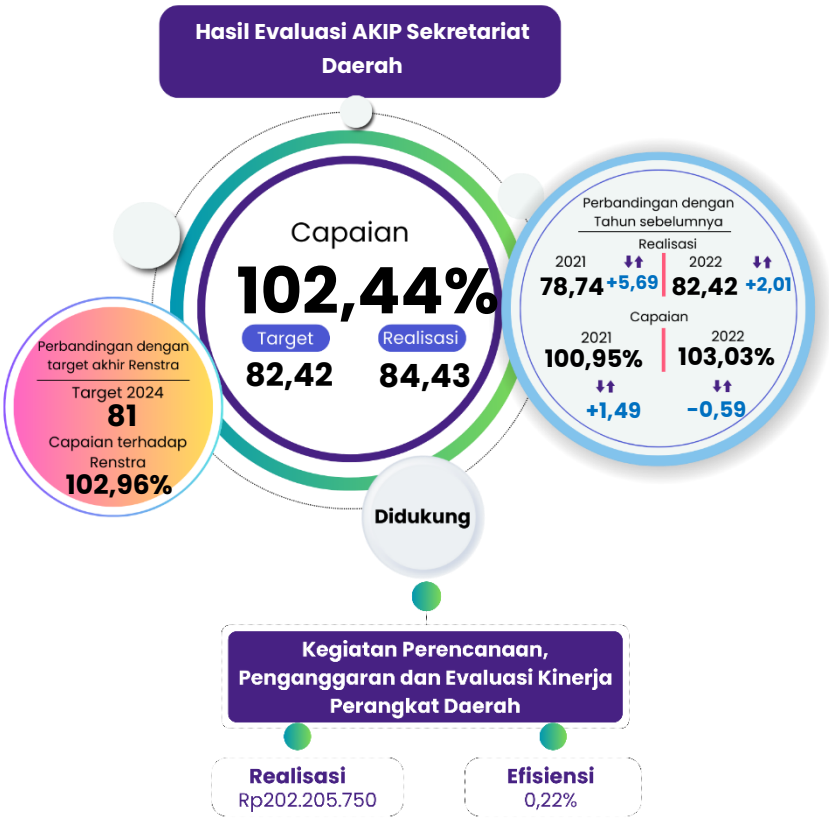

Pencapaian nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah **"A"**, tidak terlepas dari dukungan aspek akuntabilitas kinerja. Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sudah memasuki kategori **'A'** dengan interpretasi **'memuaskan'**. Khususnya pada evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023, peningkatan signifikan AKIP sebesar **2,01 poin** naik dari **82,42 poin** menjadi **84,43 poin**. Hal ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar **84 poin** atau sebesar **102,96%** dengan tingkat kemajuan **2,96%.**

Indikator hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat sebesar **84,43 (A)** tersebut diperoleh dari hasil penilaian 5 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, yaitu:

1. Perencanaan kinerja memperoleh poin **24,43**;

2. Pengukuran kinerja memperoleh poin **22,50;**

3. Pelaporan kinerja memperoleh poin **12,50;**

4. Evaluasi internal memperoleh poin **7,56;** dan

5. Capaian kinerja memperoleh poin **25**.

Keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah ini tidak lepas dari adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari semua perangkat daerah, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang konsisten. Capaian kinerja ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang diantaranya melalui upaya-upaya tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabiltas kinerja tahun sebelumnya dan peningkatan kualitas laporan kinerja Sekretariat Daerah.

Ketercapaian pencapaian kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp202.660.600,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp202.205.750,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **99,78%.** Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **0,22%** atau sebesar **Rp454.850,00**.

SASARAN STRATEGIS V

Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran kelima meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah, berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Ciamis. Yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah. Secara umum, ketercapaian kinerja indikator tersebut adalah **100 %**. Hal ini menunjukan bahwa dari sisi akuntabilitas kinerja tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah

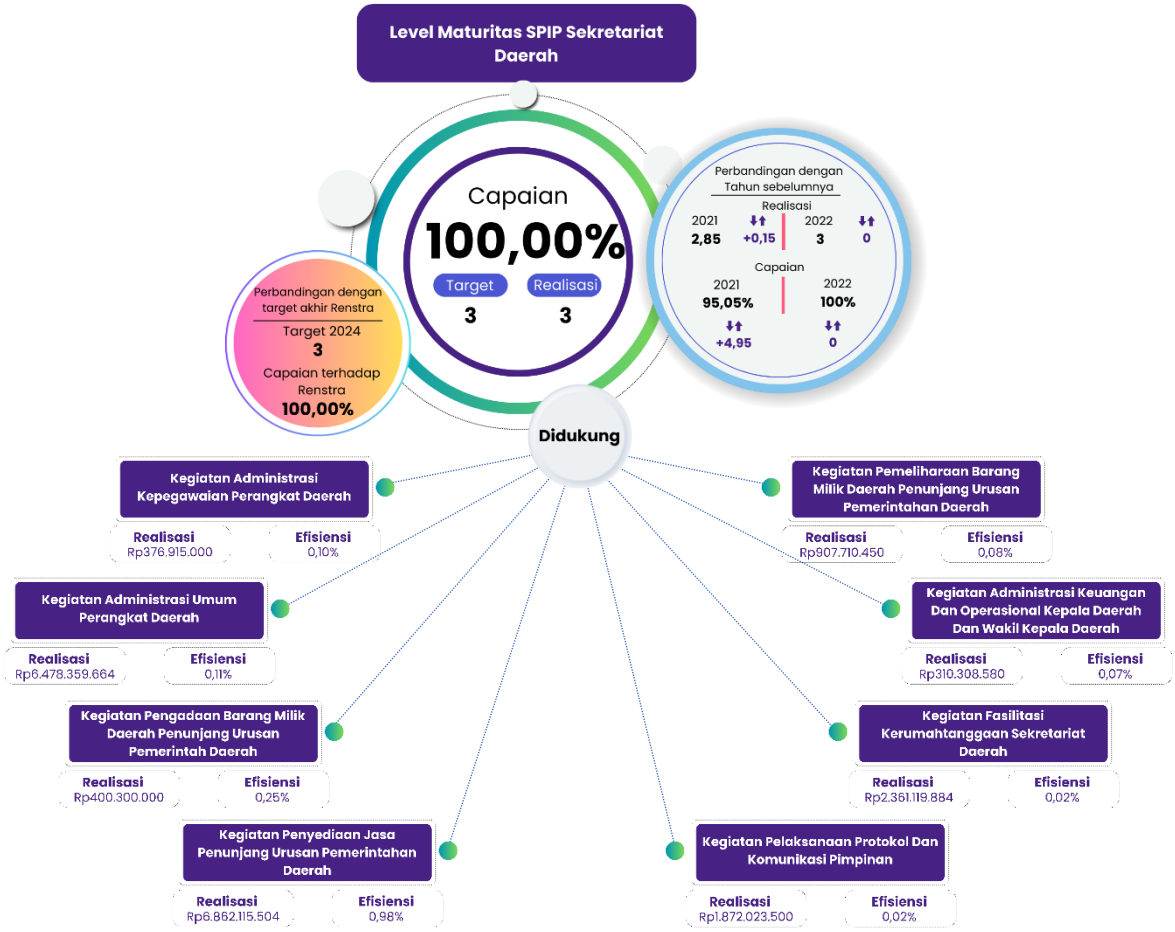

Salah satu indikator untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut level maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Maturitas SPIP menunjukan derajat kematangan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada Tahun 2023, Indikator Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Ciamis memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 3 (terdefinisi).** Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, kinerja tetap pada **level 3 (terdefinisi).** Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai yaitu **level 3 (terdefinisi)** dari target akhir renstra level 3 (terdefinisi) atau **100%**. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Upaya – Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut antara lain melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh asesor satker, asesor taat, asesor aser dan asesor keuangan terhadap penetepan tujuan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan yang semuanya di dukung dengan evidence yang lengkap.

Hasil penilaian mandiri tersebut selanjutnya dievaluasi oleh BPKP dengan tujuan untuk memastikan bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D dan memutuskan nilai akhir atas maturitas Penyelenggaraan SPIP, Managemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Kondisi lainnya untuk mendorong pencapaian kinerja level maturitas SPIP yaitu menindaklajuti saran atau rekomendasi hasil penilaian SPIP tahun sebelumnya antara lain :

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran serta perbaikan atas cascading dan indikator Tahun 2023.
2. Menyusun tim manajemen risiko pada tiap OPD
3. Peningkatan kualitas pengelolaan risiko meliputi perumusan risiko, penyebab, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko baik risiko strategis maupun opersional
4. Inspektorat melakukan reviu dan pendampingan atas risk register yang dibut oleh OPD dan memastikan OPD selaku UPR telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko fraud.

5. Melakukan pemantauan atas kejadian risiko serta efektivitas pengendaliannya
6. Melakukan identifikasi, menilai dan mengelola risiko kemitraan di tingkat Pemda atau seluruh OPD

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp16.865.717.515,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp16.789.118.632,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **99,55%.** Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **0,45%** atau sebesar **Rp76.598.883,00**.

SASARAN STRATEGIS VI

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran keenam meningkatnya meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah berkaitan dengan fungsi sekretariat daerah dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam pengeloalan keuanga daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Tahun 2023 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai pelaporan keuangan setda dengan target dan realisasi kinerja yaitu target 800 poin terealisasi sebesar 833,43 poin menunjukkan capaian kinerja sebesar **104,17%.** Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kualitas pengelolaan keuangan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut

Nilai Pelaporan Keuangan Setda

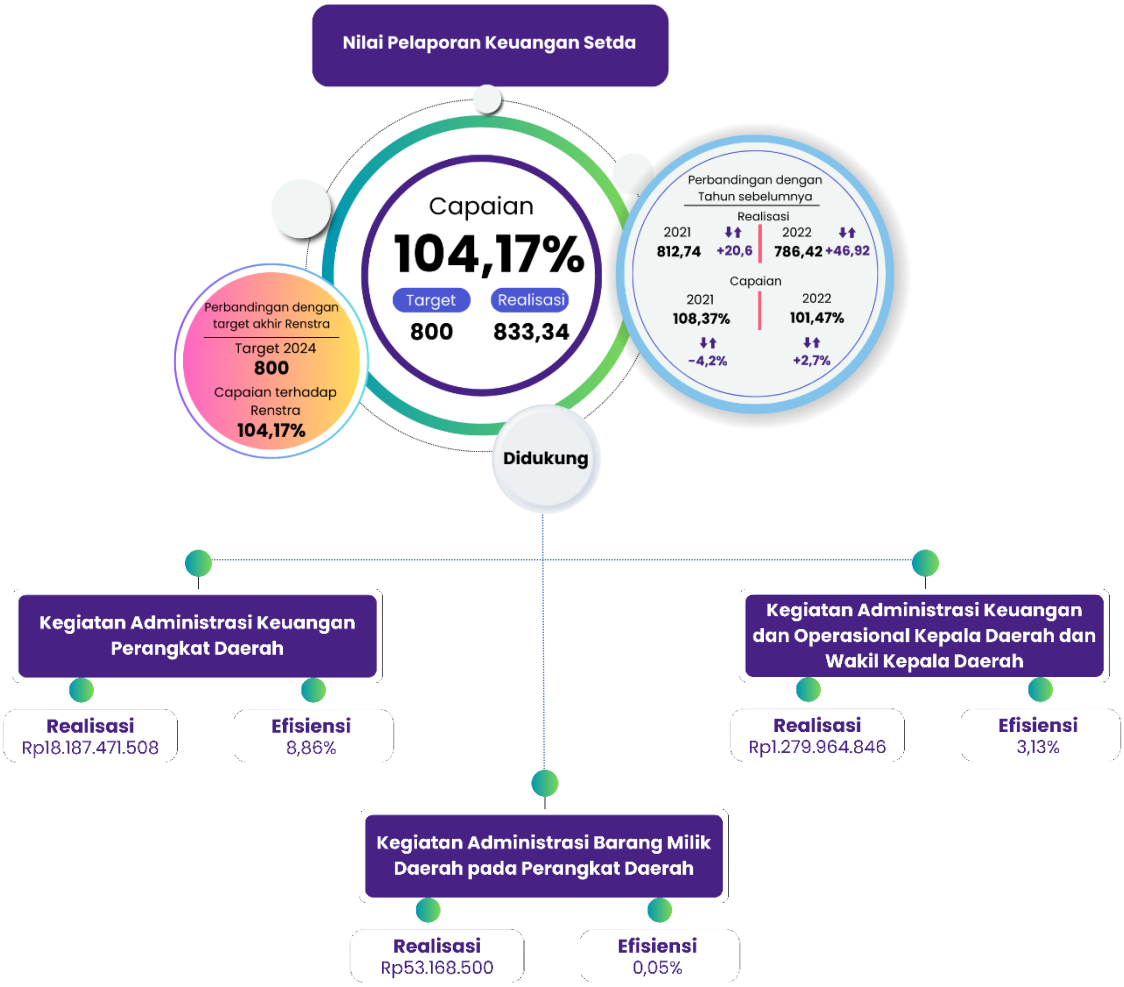

Salah satu indikator untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah yaitu Nilai Pelaporan Keuangan Setda yang diperoleh dari hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa Tahun 2023.

Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa dimaksudkan untuk menentukan peringkat terbaik dari capaian hasil pengelolaan keuangan daerah dan desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta mengetahui tahapan, proses dan pelaporan dari pengelolaan keuangan daerah dan desa. Adapun ruang

lingkup penilaian, meliputi: Rencana Strategis; Rencana Kerja; RKPD; LKIP; DPA; Rekonsiliasi Aset; Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan; Penyejian Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa Tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis mendapatkan peringkat ke-2 pengelolaan keuangan daerah kategori SKPD dengan pagu anggaran per tahun di atas 20 (dua puluh) Milyar dengan realisasi nilai sebesar **833,43 poin** dari target sebesar **800 poin**, menunjukkan capaian kinerja sebesar **104,17%.** Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, kinerja meningkat sebesar **46,92 poin atau 2,67%**. Selanjutnya, jika dibanding dengan target akhir Renstra, kinerja melebihi target sebesar **46,92 poin** atau **104,17%** dari target akhir renstra sebesar 800 poin. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa tingkat kemajuan sebesar **4,17%** dan target akhir renstra sudah tercapai di Tahun 2023.

Keberhasilan capaian kinerja Indikator sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah ini tidak lepas dari adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari semua perangkat daerah, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang konsisten. Capaian kinerja ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang diantaranya melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Ketercapaian kinerja didorong oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp21.329.258.990,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp19.520.604.854,00** sehingga kinerja anggaran tercapai sebesar **91,52%.** Penggunaan anggaran ini, dapat diefisiensi sebesar **8,48%** atau sebesar **Rp1.808.654.136,00**.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

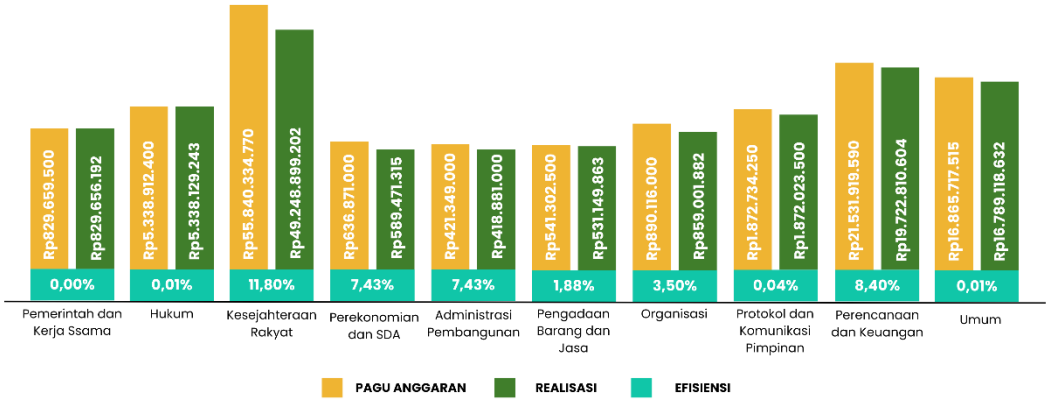

Tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp104.768.862.525,00** yang dapat direalisasikan sebesar **Rp96.199.144.403,00**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **91,82%.** Dari kinerja tersebut, diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **8,18%** atau **Rp8.569.718.122.**

Secara lebih rinci, perbandingan porsi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja core business dan kinerja penunjang adalah **20:1**. Anggaran pada core business ditetapkan sebesar **Rp66.371.225.420,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp59.687.215.167,00.** Dengan demikian, kinerja anggaran pada core business tercapai **89,93%** dan dapat diefisiensi sebesar **Rp6.684.010.253,00** atau **10,07%.**

ANGGARAN PENUNJANG

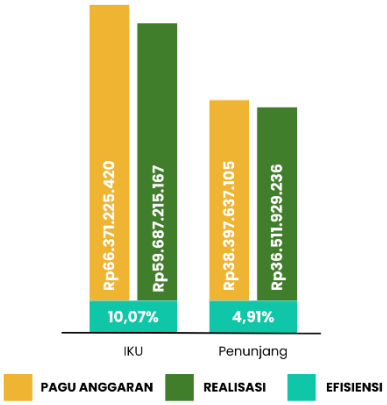

Anggaran pada penunjang ditetapkan sebesar **Rp38.397.637.105,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp36.511.929.236,00** atau kinerja tercapai sebesar **95,09%.** Dari kinerja ini, anggaran dapat diefisiensi sebesar **Rp1.885.707.869,00** atau **4,91%.**

BAB IV

PENUTUP

LKIP SETDA 2023

Merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar **102,17%.** Dalam hal ini terdapat 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dan 1 (satu) indikator tercapai sesuai target (100%) hal ini antara lain karena tingginya komitmen dan kolaborasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp104.768.862.525,00** dengan total efisiensi sebesar **8,18%** atau senilai **Rp8.569.718.122,00**.

Berdasarkan ketercapaian kinerja tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis terus berupaya mengoptimalkan implementasi SAKIP untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

LAMPIRAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Dr. H. TATANG, M.Pd.**

Jabatan : Sekretaris Daerah KabupatenCiamis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. HERDIAT SUNARYA**

Jabatan : Bupati Ciamis

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis , 22 November 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. H. HERDIAT SUNARYA	**Dr. H. TATANG, M.Pd.**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3
		- Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	- Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	88,29
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	- Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	82,42
5.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	- Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	3
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah	800

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.160.487.355	P-APBD
2.	Program PemerintahandanKesejahteraan Rakyat	Rp.	62.008.906.670	P-APBD
3.	Program Perekonomiandan Pembangunan	Rp.	1.599.468.500	P-APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**104.768.862.525**	**P-APBD**

Ciamis, 22 November 2023

BUPATI CIAMIS

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Dr. H. TATANG, M.Pd.

Tabel 1. Output Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	PERATURAN BUPATI	Peraturan Bupati Ciamis Nomor: 68 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2025	Upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencapaian SDM di daerah
2	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 400/Kpts.171-Huk/TAHUN 2023 tgl. 22 Februari 2023 tentang Penetapan Dewan Kemakmuran Mesjid Agung Ciamis sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
3	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.248-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 April 2023 tentang Penetapan Mesjid Besar Al-Qausain sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
4	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.252-Huk/TAHUN 2023 tgl. 6 April 2023 tentang Penetapan Organinasi Kemasyarakatan Sebagai Peneriman Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
5	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.260-Huk/TAHUN 2023 tgl. 12 April 2023 tentang Penetapan Organsisasi Kemasyrakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
6	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.286-Huk/TAHUN 2023 tgl. 28 April 2023 tentang Penetapan Organsisasi Kemasyrakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
7	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.288-Huk/TAHUN 2023 tgl. 2 Mei 2023 tentang Penetapan MTS. ASYSYIFA sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
8	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.289-Huk/TAHUN 2023 tgl. 2 Mei 2023 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Islam sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
9	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.290-Huk/TAHUN 2023 tgl. 2 Mei 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
10	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.292-Huk/TAHUN 2023 tgl. 3 Mei 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
11	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.293-Huk/TAHUN 2023 tgl. 3 Mei 2023 tentang Penetapan Pondok Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
12	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.298-Huk/TAHUN 2023 tgl. 4 Mei 2023 tentang Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaen Ciamis Tahun 1444 H/2023 M	Kelancaran Pelaksanaan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis
13	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.300-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Mei 2023 tentang Penetapan Pondok Pesantren Manhazul Ulum sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
14	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.301-Huk/TAHUN 2023 tgl. 8 Mei 2023 tentang Penetapan Yayasan Miftahul Ridwan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
15	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.303-Huk/TAHUN 2023 tgl. 8 Mei 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
16	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.305-Huk/TAHUN 2023 tgl. 9 Mei 2023 tentang Penetapan Pondok Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
17	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.307-Huk/TAHUN 2023 tgl. 10 Mei 2023 tentang Penetapan Yayasan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
18	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.308-Huk/TAHUN 2023 tgl. 10 Mei 2023 tentang Penetapan Organisaisi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
19	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.309-Huk/TAHUN 2023 tgl. 10 Mei 2023 tentang Penetapan Pondok Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
20	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.310-Huk/TAHUN 2023 tgl. 10 Mei 2023 tentang Penetapan Yayasan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
21	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.314-Huk/TAHUN 2023 tgl. 12 Mei 2023 tentang Penetapan Organisasai Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
22	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.332-Huk/TAHUN 2023 tgl. 22 Mei 2023 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Islam sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
23	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.334-Huk/TAHUN 2023 tgl. 22 Mei 2023 tentang Penetapan Organisasai Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
24	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.337-Huk/TAHUN 2023 tgl. 24 Mei 2023 tentang Penetapan Yayasan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
25	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.338-Huk/TAHUN 2023 tgl. 24Mei 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
26	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.347-Huk/TAHUN 2023 tgl. 30 Mei 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
27	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.415-Huk/TAHUN 2023 tgl. 6 Juli 2023 tentang Penetapan Pondok Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
28	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.449-Huk/TAHUN 2023 tgl. 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Organisari Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
29	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.509-Huk/TAHUN 2023 tgl. 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Organisari Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
30	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.510-Huk/TAHUN 2023 tgl. 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Organisari Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
31	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.511-Huk/TAHUN 2023 tgl. 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
32	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.512-Huk/TAHUN 2023 tgl. 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Taman Pendidikan Qur'an Hasan Bisri Mustofa sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
33	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.513-Huk/TAHUN 2023 tgl. 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Taman Pendidikan Qur'an Hasan Bisri Mustofa sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
34	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.515-Huk/TAHUN 2023 tgl. 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
35	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.516-Huk/TAHUN 2023 tgl. 20 Oktober 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
36	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.517-Huk/TAHUN 2023 tgl. 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Yayasan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
37	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.528-Huk/TAHUN 2023 tgl. 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
38	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.529-Huk/TAHUN 2023 tgl. 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
39	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.564-Huk/TAHUN 2023 tgl. 10 November 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
40	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.569-Huk/TAHUN 2023 tgl. 13 November 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
41	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.590-Huk/TAHUN 2023 tgl. 24 November 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
42	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.591-Huk/TAHUN 2023 tgl. 27 November 2023 tentang Penetapan Yayasan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
43	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.593-Huk/TAHUN 2023 tgl. 29 November 2023 tentang Penetapan Penetapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
44	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.595-Huk/TAHUN 2023 tgl.1 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
45	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.596-Huk/TAHUN 2023 tgl.1 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
46	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.597-Huk/TAHUN 2023 tgl.4 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
47	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.598-Huk/TAHUN 2023 tgl. 4 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
48	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.599-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
49	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.600-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Pondok Pesantren sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
50	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.601-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
51	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.602-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Yayasan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
52	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.603-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
53	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.604-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
54	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.605-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
55	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.606-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Madrasah Diniyah Nurul Janah sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
56	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.608-Huk/TAHUN 2023 tgl. 5 Desember 2023 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Islam sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
57	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.630-Huk/TAHUN 2023 tgl. 15 Desember 2023 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Islam sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
58	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.631-Huk/TAHUN 2023 tgl. 15 Desember 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
59	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.635-Huk/TAHUN 2023 tgl. 18 Desember 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
60	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.636-Huk/TAHUN 2023 tgl. 18 Desember 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
61	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900/Kpts.638-Huk/TAHUN 2023 tgl. 19 Desember 2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Belanja Hibah yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
62	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.447-Huk/TAHUN 2023 tgl. 3 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an XLV Tingkat Kabupaten Ciamis 2023	Kelancaran Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XLV Tingkat Kabupaten Ciamis 2023
63	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.89-Huk/TAHUN 2023 tgl. 23 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Tercapainya Sasaran dan Target Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023
64	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.90-Huk/TAHUN 2023 tgl. 23 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Tercapainya Sasaran dan Target Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023
65	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.91-Huk/TAHUN 2023 tgl. 23 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina mental Spiritual Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Tercapainya Sasaran dan Target Kinerja Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina mental Spiritual Di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023
66	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 400/kpts.663-Huk/TAHUN 2023 tgl. 28 Desember 2023 Tentang Penghargaan berupa Biaya Umroh kepada Ulama/Guru Ngaji/Imam Masjid di Kabupaten Ciamis Tahunu 2023	Apresiasi kepada Ulama/Guru Ngaji/Imam Masjid atas dedikasinya dalam bidang keagamaan terhadap pembangunan mental spiritual masyarakat Kabupaten Ciamis
67	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 800.1/Kpts.445-Huk/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ciamis	Membentuk Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
68	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 800.1/Kpts.594-Huk/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis	Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Ciamis dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
69	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 900/Kpts.251-Huk/Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Kerja Sama Kunci Bersama Sebagai Penerima Belanja Hibah Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Penunjang penyelenggaraan peran dan fungsi Sekretariat Kunci Bersama
70	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 800.1/Kpts.15-Huk/Sek/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Verivikasi Pemberian Belanja Hibah kepada Sekretariat Kerjasama Kunci Bersama pada Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Penunjang penyelenggaraan peran dan fungsi Sekretariat Kunci Bersama
71	SURAT EDARAN	Nomor : 900/1602-Kesra tanggal 27 Oktober 2023 tentang Himbauan Bantuan Solidaritas Palestina	Solidaritas dan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina yang mengalami krisis akibat perang
72	SURAT EDARAN	Nomor : 451/388/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Himbauan Amaliyah Ramadhan 1444H /2023 M	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kondusifitas pelaksanaan Ibadah di bulan Ramadhan
73	SURAT EDARAN	Nomor : 400.8.2.3/1.898-Kesra tanggal 20 Desember 2023 tentang Himbauan Kondusifitas Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024	Kondusifitas pelaksanaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru
74	SURAT EDARAN	Nomor : 400.8.2.3/1.480-Kesra tanggal 11 Oktober 2023 tentang Himbauan Shalat Istisqo Tahun 1445 H/ 2023 M	Ihktiar batiniah atas kekeringan dan kekurangan air akibat kemarau berkepanjangan

Tabel 2. Output Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN	BAGIAN
1	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.18-Huk/TAHUN 2023 tgl. 2 Januari 2023 Tentang Tim Pelaksana Pembinaan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ciamis	Untuk pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barng/Jasa
2	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.18-Huk/TAHUN 2023 tgl.2 Januari 2023 Tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Ciamis	Untuk melaksanakan penyelenggaraan fungsi pelayanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barng/Jasa
3	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 800.1/kpts.17-Huk/TAHUN 2023 tgl. 2Januari 2023 Tentang Tim Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kabupaten Ciamis	Untuk pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi	Bagian Pengadaan Barng/Jasa
4	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 0003.3/kpts.20-Huk/Sek/TAHUN 2023 tgl. 25 September 2023 Tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga	Untuk memfasilitasi penayangan/pencantuman etalase baru pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barng/Jasa
5	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 000.3/kpts.9-Huk/Sek/TAHUN 2023 tgl. 13 Februari 2023 Tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Kendaraan Bermotor	Untuk memfasilitasi penayangan/pencantuman etalase baru pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barng/Jasa
6	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 000.3/kpts.10-Huk/Sek/TAHUN 2023 tgl. 9 Februari 2023 Tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Jasa Penyelenggara Acara	Untuk memfasilitasi penayangan/pencantuman etalase baru pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barng/Jasa
7	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 00.3/Kpts.88-Huk/Tahun 2023 Penetapan Sepuluh Paket Strategis Pengadaan Bangadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesaui tujuannya	Bagian Administrasi Pembangunan
8	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 800.1/Kpts.87-HUk/Tahun 2023 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023	menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akuntabel, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SIRAGA)	Bagian Administrasi Pembangunan
9	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 800.1/Kpts.121-HUk/Tahun 2023 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2023	untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu tim	Bagian Administrasi Pembangunan
10	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor: 800.1/Kpts.121-HUk/Tahun 2023 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024	Untuk kelancaran kegiatan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan dan Sinergitas Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim	Bagian Administrasi Pembangunan
11	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 500/Kpts.126-Huk/Tahun 2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Penetapan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Mendukung pembangunan akses dan pengembangan sistem penyediaan air minum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kb. Ciamis

NO	JENIS KEBIJAKAN	NOMOR/TENTANG	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN	BAGIAN
12	KEPUTUSAN BUPATI	Nomor : 900.13.2/Kpts.499-Huk/Tahun 2023 tanggal 05 Oktober 2023 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana Kabupaten Ciamis yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Untuk mempercepat jalannya roda bisnis perusahaan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali serta meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kb. Ciamis
13	SURAT EDARAN	Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 Tanggal 13 Juli 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui E-Purchasing di Kabupaten Ciamis	Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
14	SURAT EDARAN	Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Semester I Tahun Anggaran 2023	Untuk Meningkatkan capaian penilaian Korsupgah KPK area intervensi Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Indikator Vendor Mangement System	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
15	SURAT EDARAN	Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pencatatan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung (Pencatatan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing) Untuk Meningkatkan Akurasi Nilai Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Prosuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Kopperasi	UNTUK MENINGKATKAN AKURASI NILAI REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
16	SURAT EDARAN	Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 8 Desmber 2023 tentang Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	Evalusi Kinerja Vendor pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Ciamis TA. 2023 guna memenuhi Capaian penilaia Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dan Penilaian Korsupgah KPK	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
17	SURAT EDARAN	Surat Erdaran Bupati Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secra Nasional Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupatenm Ciamis	Dalam rangka mendukung dan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada PBJ dan peningkatan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023

No	URAIAN		KINERJA TAHUN n			PERBANDINGAN TAHUN n DENGAN n-1					PERBANDINGAN REALISASI TAHUN n DENGAN TARGET RENSTRA		PROGRAM PENDUKUNG	PEMANFAATAN ANGGARAN				
	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022	Peningkatan/ Penuruan Capaian 2023	Peningkatan/ Penuruan Realisasi 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2024	Realisasi 2023 terhadap target renstra Tahun 2024 (%)	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELSISIH ANGGARAN	CAPAIAN 2023 (%)	EFISIENSI (%)
					(5/4)*100)			(8/7)*100)	(6-9)/9*100	(5-8)/9*100		(5/12)*100				(15-16)	(16/15)*100	(17/15)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																		
1	Status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indikator yang menggambarkan hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,00	3,1262	104,21	3,00	2,87	95,67	8,93	0,27	3,00	104,21	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	224.848.000	224.848.000	-	100,00	-
2	Persentase Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	100	102,89	102,89	100	103,83	103,83	-0,91	- 0,91	100	102,89	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	61.784.058.670	55.191.839.607	6.592.219.063	89,33	10,67
												Efisiensi Sasaran 1		**62.008.906.670**	**55.416.687.607**	**6.592.219.063**	**89,37**	**10,63**
SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Perekonomian danAdministrasi Pembangunan																		
3	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	Indikator yang menunjukkan rancangan kebijakan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang telah disusun, ditetapkan menjadi kebijakan daerah	100	105,53	105,53	100	121,44	121,44	-13,10	- 13,10	100	105,53		1.599.468.500	1.539.502.178	59.966.322	96,25	3,75
												Efisiensi Sasaran 2		**1.599.468.500**	**1.539.502.178**	**59.966.322**	**96,25**	**3,75**
SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																		
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	88,29	88,37	100,09	82	88,29	107,67	-7,04	0,07	84	105,20		2.762.850.250	2.731.025.382	31.824.868	98,85	1,15
												Efisiensi Sasaran 3		**2.762.850.250**	**2.731.025.382**	**31.824.868**	**98,85**	**1,15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah																		
5	Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian keberhasilan penerapan SAKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Sekretariat Daerah	82,42	84,43	102,44	80	82,42	103,03	-0,57	1,95	82	102,96		202.660.600	202.205.750	454.850	99,78	0,22
Efisiensi Sasaran 4														**202.660.600**	**202.205.750**	**454.850**	**99,78**	**0,22**
SASARAN 5 : Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah																		
6	Level Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian keberhasilan penerapan SPIP pada instansi pemerintah	3	3	100,00	3	3	100,00	0,00	-	3	100,00		16.865.717.515	16.789.118.632	76.598.883	99,55	0,45
Efisiensi Sasaran 5														**16.865.717.515**	**16.789.118.632**	**76.598.883**	**99,55**	**0,45**
SASARAN 6 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah																		
7	Nilai Pelaporan Keuangan Setda	Kategori yang menggambarkan hasil penilaian kinerja pelaporan keuangan untuk mendorong peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	800	833,34	104,17	775	786,42	101,47	2,65	46,24	800	104,17		21.329.258.990	19.520.604.854	1.808.654.136	91,52	8,48
Efisiensi Sasaran 6														**21.329.258.990**	**19.520.604.854**	**1.808.654.136**	**91,52**	**8,48**